

Implementasi Penyaluran Hibah Air Minum Perkotaan PDAM Tirta Dharma

Oleh:

¹ Delvira Permata Sari; ² Ananta Prathama

^{1, 2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email. delvirapermata@gmail.com

Abstrak

Musim kemarau di Kecamatan Kedunggalar membawa dampak buruk bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu sulit mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, PDAM Tirta Dharma melaksanakan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan untuk MBR di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Dharma sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada, namun juga masih perlu dilakukannya peningkatan kegiatan sosialisasi terkait penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar antara para petugas PDAM Tirta Dharma dengan para perangkat desa agar MBR dapat mengetahui jelas mengenai pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan.

Kata Kunci: Implementasi; Penyaluran Hibah Air Minum; PDAM

Abstract

Low-income communities (MBR) in Kedunggalar District face difficulty accessing clean water during the dry season. To address this, PDAM Tirta Dharma has provided grants for urban drinking water distribution in the area. This study aims to examine and describe the implementation of these grants for MBR in Kedunggalar District, Ngawi Regency. The study used a qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the distribution of urban drinking water grants by PDAM Tirta Dharma in Kedunggalar District has been successful and aligned with existing theories. However, it is recommended that socialization activities related to the distribution of these grants should be improved between PDAM Tirta Dharma officers and village officials, so that MBR can have a better understanding of how the grants are being implemented.

Keywords: Implementation; Grant Distribution of Drinking Water; PDAM

PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dapat berimplikasi terhadap akses untuk mendapatkan air bersih. Penyediaan air bersih merupakan salah satu agenda penting yang harus terpenuhi dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Meskipun secara potensial ketersediaan air relatif melimpah, masih sering ditemukan masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu apabila ketersediaan air mengalami keterbatasan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk, dapat menimbulkan kekeringan bagi tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terhambat dan berujung hasil panen tumbuhan akan berkurang.

Keterbatasan air bersih yang terjadi pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur salah satunya berada Kabupaten Ngawi yaitu disebabkan jarak lokasi dari sumber air bersih lebih dari tiga kilometer. Timbulnya keterbatasan air bersih di beberapa wilayah tersebut yaitu pada saat musim kemarau. Akibatnya, masyarakat yang biasanya memenuhi kebutuhan air bersih bergantung pada air sumur dan sumber air sering mengalami kekeringan sehingga masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Kemudian pada urutan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi menempati urutan ke tiga puluh tiga dari tiga puluh delapan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan data BPS Kabupaten Ngawi, pada periode tahun 2018-2020 perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Ngawi relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi mencapai 123,09 ribu jiwa dengan presentase 14,83%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,44% dengan jumlah angka kemiskinan sebesar 119,43 ribu. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 128,19 ribu dengan presentase 15,44%.

Menurut Hunter dikutip oleh (Alihar, 2018) dinamika kependudukan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketersediaan air bersih. Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dapat berimplikasi terhadap akses untuk mendapatkan air bersih. Penyediaan air bersih merupakan salah satu agenda penting yang harus terpenuhi dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Sri Nurhayati dikutip oleh (Baqori & Pambudi, 2018) Penyediaan air bersih pada prinsipnya yaitu tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya di daerah pedesaan. Namun, penyediaan air bersih saat ini masih dilakukan oleh masyarakat sendiri. Menurut Dharma, pada implementasi kebijakan berhubungan dengan sejauh mana implementasi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Maharsani, 2022). Kemudian hibah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan pihak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Program Hibah Air Minum Perkotaan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020 adalah salah satu program hibah air minum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan untuk MBR dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Program Hibah Air Minum Perkotaan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dalam APBD. Maka dari itu, pada tahun 2017 Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan dan pengelolaan Hibah Air Minum Perkotaan dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur

Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2017 untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pelayanan air bersih untuk MBR.

Dari kebijakan yang telah dikeluarkan dan dikelola oleh stakeholders yang bersangkutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melalui PDAM Kabupaten Ngawi untuk memenuhi cakupan pelayanan bagi masyarakat miskin Kabupaten Ngawi yang belum memperoleh layanan air bersih, melaksanakan penyaluran hibah air minum perkotaan melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melaksanakan penyaluran hibah air minum perkotaan berdasarkan surat edaran terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2020 yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020. Surat Edaran tersebut memuat kepentingan adanya Program Hibah Air Minum Perkotaan yaitu menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan melalui sumber pendanaan yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri APBN dengan pendekatan kinerja yang terukur dan meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak melalui pemberian dan penyaluran hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai intensif dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan penyediaan pelayanan air minum.

Tabel 1. 1 Daftar Kecamatan Penerima Manfaat program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2022

KECAMATAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
PARON	133 KK	260 KK	492 KK	405 KK
JOGOROGO	22 KK	73 KK	224 KK	335 KK
GERIH	12 KK	223 KK	258 KK	285 KK
NGAWI	204 KK	24 KK	162 KK	301 KK
GENENG	52 KK	114 KK	150 KK	73 KK
KARANGJATI	86 KK	14 KK	19 KK	54 KK
KWADUNGAN	-	76 KK	20 KK	74 KK
NGRAMBE	10 KK	-	25 KK	218 KK
KENDAL	24 KK	-	49 KK	203 KK
KEDUNGALAR	56 KK	-	632 KK	515 KK
WIDODAREN	7 KK	-	37 KK	36 KK
MANTINGAN	4 KK	-	-	7 KK
PADAS	69 KK	-	-	5 KK
SINE	27 KK	-	14 KK	96 KK
BRINGIN	-	-	-	18 KK
JUMLAH	762 KK	784 KK	2082 KK	2625 KK

Sumber: PDAM Kabupaten Ngawi Tahun 2022

Pada tabel 1.2 dari lima belas kecamatan di Kabupaten Ngawi yang menerima hibah air minum perkotaan, Kecamatan Kedungalar merupakan kecamatan di Kabupaten Ngawi yang menerima hibah air minum perkotaan dengan penerima manfaat program hibah air minum paling banyak pada tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 sebanyak 632 KK dan pada tahun 2022 sebanyak 515 KK. Penerimaan manfaat hibah air minum perkotaan pada Kecamatan Kedungalar berdasarkan hasil baseline survey yang telah dilakukan oleh PDAM Kabupaten Ngawi dan Tim Konsultan

Baseline yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu peminat dari MBR paling banyak. Hal ini dikarenakan MBR di Kecamatan Kedunggalar telah memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kriteria masyarakat penerima manfaat hibah di Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020.

Selain penerima manfaat hibah air minum perkotaan Kabupaten Ngawi terbanyak dan kondisi air bersih sulit didapatkan, di Kecamatan Kedunggalar juga terdapat air kapur yang cukup tinggi sehingga warga disana sulit mendapatkan akses air bersih. Kemudian MBR di beberapa RT di Kecamatan Kedunggalar masih belum mengerti terkait penyaluran hibah air minum perkotaan dan pelayanan PDAM Kabupaten Ngawi dikarenakan kurang jelasnya MBR memahami informasi terkait penyaluran hiba air minum perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa oknum perangkat desa tidak menyalurkan informasi yang telah diberikan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi melalui sosialisasi. Berdasarkan pemaparan dari permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kedunggalar, memuat tujuan untuk dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ini adalah jenis metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Siyoto, Sodik 2015). Jenis penelitian ini menghasilkan temuan yang didapatkan melalui data-data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip dan tes (Farida, 2014). Dalam penelitian kualitatif, analisis data digunakan untuk memproses dan mengolah data bukan angka yang disebut data kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan diawali sejak peneliti menentukan fokus yang akan diteliti sampai dengan akhir penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1984) dikutip dari (Sugiyono, 2019) bahwasannya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktifitas dalam data yaitu *collection data, reduction data, display data, dan conclusion drawing/verification*. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui fenomena yang ada di lapangan dan mendiskripsikan secara mendalam terhadap kajian peneliti mengenai penyaluran hibah air minum melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Ngawi di Kecamatan Kedunggalar sehingga menjawab kebenaran pada suatu fenomena yang terjadi di objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak dilaksanakan pemerintah yang wajib mempunyai manfaat untuk masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian atau dampak buruk. PDAM Kabupaten Ngawi melaksanakan

penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum yang layak bagi MBR di kecamatan Kedunggalar dan mengatasi krisis air disaat musim kemarau tiba di Kecamatan Kedunggalar. Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dan mengeahui Implementasi Penyaluran Hibah Air Minum Perkotaan untuk MBR di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Selanjutnya terdapat empat fokus dalam penelitian ini terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah faktor yang mempunyai peran penting sebagai acuan agar para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dalam implementasi kebijakan. Implementasi akan berjalan efektif jika tujuan kebijakan dipahami oleh para pelaksana yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Pada proses implementasi penyaluran hibah air minum di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada proses transmisi informasi dari PDAM Kabupaten Ngawi dan wilayah IKK Kedunggalar kepada para perangkat desa di Kecamatan Kedunggalar selanjutnya diteruskan kepada MBR maupun transmisi informasi yang dilakukan para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan wilayah IKK Kedunggalar dilakukan melalui sosialisasi secara langsung. Sosialisasi sudah dilakukan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi kepada Kepala Desa, Ketua RT, Kepala Dusun dan Ketua RW di Kecamatan Kedunggalar.

Gambar 1. Sosialisasi Penyaluran Hibah



Sumber: PDAM Kabupaten Ngawi 2023

Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan daerah yang mempunyai *idle capacity* yang cukup. Segala informasi mengenai kebijakan penyaluran hibah air minum perkotaan dari petugas PDAM Kabupaten Ngawi kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT kemudian diteruskan kepada para MBR di Kecamatan Kedunggalar melalui sosialisasi yang diadakan secara langsung. Akan tetapi ada beberapa oknum perangkat desa yang tidak melaksanakan penyaluran informasi terkait penyaluran hibah ini kepada MBR di dua RT di Desa Wonorejo sehingga MBR di dua RT tersebut tidak mengikuti penyaluran hibah air minum perkotaan. Menurut Agustino bahwa pentransmisi komunikasi diperlukan dengan bertujuan agar para pembuat keputusan dan para pelaksana semakin memahami kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat

(Sahya, 2014:251). Komunikasi yang dilaksanakan melalui sosialisasi serta pendekatan yang persuasif akan mendukung tercapainya tujuan dan mendorong partisipasi masyarakat lebih optimal (Muda & Angelia, 2018). Maka transmisi pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah berjalan dengan baik karena informasi yang disampaikan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi sudah tepat sasaran dan sesuai ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yaitu kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan melainkan juga disampaikan kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kejelasan informasi terkait implementasi penyaluran hibah yang telah disampaikan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan petugas PDAM wilayah IKK Kedunggalar kepada para perangkat desa kemudian diteruskan kepada MBR melalui sosialisasi secara langsung sehingga para perangkat desa dan MBR sudah memahami dengan jelas terkait informasi penyaluran hibah air minum perkotaan. Meskipun ada beberapa oknum perangkat desa yang tidak menyalurkan informasi kepada MBR di dua RT di Desa Wonorejo. Sehingga MBR di dua RT di Desa Wonorejo tersebut tidak mengikuti penyaluran hibah air minum perkotaan. Selain itu para petugas PDAM Kabupaten Ngawi sudah memahami dengan jelas terkait informasi penyaluran hibah air minum perkotaan melalui rapat teknis yang dilaksanakan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi. Maka kejelasan informasi pada penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tersebut harus jelas sampai ke sasaran kebijakan.

Konsistensi dalam komunikasi perintah yang diberikan harus dilaksanakan dengan konsisten dan jelas. Kemudian konsistensi pada pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan melalui koordinasi dilakukan secara rutin setiap tahun karena pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kabupaten Ngawi ditunjukkan untuk membantu masyarakat disana untuk memenuhi kebutuhan air bersih disaat musim kemarau dan PDAM Kabupaten Ngawi sangat terbantu oleh pelaksanaan penyaluran hibah air minum untuk mendapatkan pelanggan air minum. Maka konsistensi dalam penyaluran hibah air minum perkotaan telah sesuai dengan ungkapan George III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yaitu implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah – perintah yang diterapkan atau dijalankan harus konsisten dan jelas.

Pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar kegiatan komunikasi sudah berjalan dengan baik karena para petugas PDAM Kabupaten Ngawi menyampaikan informasi terkait penyaluran hibah air minum perkotaan kepada para perangkat desa secara maksimal dan dilakukan secara rutin setiap tahun sehingga informasi yang sudah disampaikan berjalan dengan sesuai kebijakan yang ada.

Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor kedua setelah komunikasi untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Subfokus pertama yang menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu *staff*. Pada sumber daya *staff* dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan wilayah IKK Kedunggalar. Sumber daya *staff* dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar yaitu petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan wilayah IKK Kedunggalar sebagai pelaksana kebijakan sudah mencukup jumlahnya untuk melaksanakan serangkaian tahapan penyaluran hibah air minum di Kecamatan Kedunggalar. Sumber daya *staff* dalam penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh *staff* dengan jumlah dan kemampuan.

Sumber daya informasi merupakan subfokus kedua yang memegang peranan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dengan adanya sumber daya informasi yang relevan dan jelas mengenai tata cara mengimplementasikan kebijakan yang telah dirancang dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan efektif (Nuraini & Prathama, 2022). Sumber daya informasi merupakan hal penting dalam suatu kebijakan. Para pelaku harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana mereka harus melakukannya serta data mengenai ketaatan para pelaksana kebijakan terhadap peraturan pemerintah (Muda & Angelia, 2018).

Tujuan adanya informasi yaitu agar para pelaksana memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sumber daya informasi dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan yaitu terdapat terdapat pedoman pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan yang digunakan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi yaitu Pedoman Pengelolaan Hiba Air Minum APBN Tahun 2020 di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020 yang memuat tujuan, tugas, dan petunjuk teknis penyaluran hibah air minum perkotaan yang dimana telah memuat tugas setiap instansi dalam melaksanakan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar dan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar. Dengan demikian, sumber daya informasi dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yang menyatakan bahwa dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, pada informasi harus terdapat pedoman kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Sumber daya kewenangan mempunyai pengaruh yang penting pada implementasi kebijakan karena jika dihadapkan suatu permasalahan, pihak yang mempunyai kewenangan yang berhak memberi keputusan mengenai permasalahan tersebut. Kewenangan mempunyai pengaruh yang penting pada implementasi kebijakan

karena jika dihadapkan suatu permasalahan, pihak yang mempunyai kewenangan yang berhak memberi keputusan mengenai permasalahan tersebut. Kemudian pada sumber daya kewenangan dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar yaitu kewenangan implementor terdapat di Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Nomor 690/404.702/2022 Tentang Tim Pelaksana Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2022 dimana masing-masing jabatan dalam tim pelaksana mempunyai wewenang dalam menjalankan implementasi penyaluran hibah ini.

Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Marsudi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran, beliau mengatakan bahwa kewenangan implementor telah tercantum di Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Nomor 690/404.702/2022 Tentang Tim Pelaksana Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2022 yang dimana masing-masing petugas mempunyai kewenangan sesuai jabatan yang telah diberikan seperti Kepala Bagian Pemasaran mempunyai kewenangan yaitu mengendalikan dan mengambil tindakan perbaikan atas tugas dan tanggungjawab tim, mengarahkan tugas ke petugas pemasaran sini dan IKK Kedunggalar seperti mendata calon pendaftar yaitu MBR yang menerima manfaat hibah air minum ini dan mengadakan sosialisasi. Dengan demikian sumber daya kewenangan pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yang menyatakan bahwa kewenangan sangat dibutuhkan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan kondisi yang ada di lapangan

Pada sumber daya fasilitas adalah salah satu komponen penting dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya fasilitas memadai akan mempermudah para pelaksana sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Pada sumber daya fasilitas dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar yaitu telah tersedianya suatu ruangan yang telah disediakan oleh perangkat desa dalam melaksanakan sosialisasi yang dilakukan para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan IKK Kedunggalar terkait penyampaian informasi penyaluran hibah air minum perkotaan. Sumber daya fasilitas dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa fasilitas fisik merupakan hal yang penting dalam implementasi.

Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan yang dilaksanakan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi berjalan dengan baik.

Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu program. Disposisi dari pelaksana terhadap kebijakan harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan para pelaksana yang

mempunyai hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Nuraini & Prathama, 2022). Pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar didukung oleh sikap para petugas implementor.

Kognisi pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan ini. Pemahaman pada pelaksanaan penyaluran hibah air minum akan mempengaruhi sikap dari kebijakan tersebut. Para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan IKK Kecamatan Kedunggalar telah memahami terkait isi, aturan, maupun petunjuk teknis yang ada di Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020. Pada arahan atau tanggapan para pelaksana dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dilaksanakan sesuai arah pembuat kebijakan. Dengan demikian kognisi pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif jika para implementor kebijakan paham mengenai ketentuan pelaksanaan suatu kebijakan.

Para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan wilayah IKK Kedunggalar telah melaksanakan dengan baik pada penyaluran hibah ini tanpa adanya penolakan hal ini dikarenakan dengan adanya tujuan yaitu untuk membantu MBR di Kecamatan Kedunggalar dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Pada intensitas program dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yaitu perlu adanya responsivitas yang intens terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sudah dilaksanakan dengan maksimal berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian pelaksanaan penyaluran hibah ini akan dilakukan sampai tahun 2024 dikarenakan implementasi program ini merupakan kebijakan dari Presiden RI Joko Widodo. Dengan demikian pada tanggapan para pelaksana dan intensitas program dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yang menyatakan bahwa suatu implementasi kebijakan mampu mencapai tujuan kebijakan yang telah direncanakan dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan dan harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens secara terus menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah direncanakan.

Disposisi dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari para petugas PDAM Kabupaten Ngawi telah memahami dan melaksanakan implementasi kebijakan ini hingga pada tahun 2024 dengan tanpa adanya penolakan.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan (Nuraini & Prathama, 2022). Struktur Birokrasi dalam mengimplementasi kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi kebijakan sehingga diperlukan pemahaman yang jelas untuk melaksanakannya (Muda & Angelia, 2018). Struktur birokrasi dalam implementasi penyaluran hibah di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berkaitan dengan Standart Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja antara petugas PDAM Kabupaten Ngawi dalam penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020 dan pembagian tanggung jawab dan tugas masing-masing petugas PDAM Kabupaten Ngawi sesuai dengan pembagiannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Nomor 690/404.702/2022 Tentang Tim Pelaksana Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2022. Struktur Birokrasi dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah sesuai dengan ungkapan George Edward III sebagaimana dikutip oleh (Sahya, 2014:251) yaitu harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens secara terus menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah direncanakan.

Struktur birokrasi pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah tersedianya SOP dan pembagian tanggung jawab kerja antara para petugas PDAM Kabupaten Ngawi sehingga dalam pelaksanaan implementasi penyaluran hibah ini telah berjalan sesuai SOP yang berlaku dan tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hasil dan pembahasan terkait Implementasi Penyaluran Hibah Air Minum Perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dapat ditarik kesimpulan diantaranya 1) Komunikasi pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yaitu sudah berjalan dengan baik karena para petugas PDAM Kabupaten Ngawi menyampaikan informasi terkait penyaluran hibah air minum perkotaan kepada para perangkat desa secara maksimal dan dilakukan secara rutin setiap tahun sehingga informasi yang sudah disampaikan berjalan dengan sesuai kebijakan yang ada, 2) Sumber daya dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan yang dilaksanakan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi berjalan dengan baik, 3) Disposisi dalam implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari para petugas PDAM Kabupaten Ngawi telah memahami dan melaksanakan implementasi kebijakan ini hingga pada tahun 2024 dengan tanpa adanya penolakan, 4)

Struktur birokrasi pada implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar telah tersedianya SOP dan pembagian tanggung jawab kerja antara para petugas PDAM Kabupaen Ngawi sehingga dalam pelaksanaan implementasi penyaluran hibah ini telah berjalan sesuai SOP yang berlaku dan tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap implementasi penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar yaitu Diperlukannya peningkatan kegiatan sosialisasi antara para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dengan para perangkat desa agar MBR dapat mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan tersebut dan Perlunya diadakan pengawasan oleh para petugas PDAM Kabupaten Ngawi dan IKK wilayah Kecamatan Kedunggalar kepada para perangkat desa di Kecamatan Kedunggalar dalam menyampaikan informasi yang sudah disampaikan oleh para petugas sebelumnya terkait pelaksanaan penyaluran hibah air minum perkotaan di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alihar, F. (2018). Penduduk dan akses air bersih di kota semarang. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 67–76.
- Baqori, A., & Pambudi, A. (2018). Efektivitas Program Hibah Air Minum Sr Mbr Tahun 2015 Pdam Tirta Binangunkabupaten Kulon Progo. *Adinegara*, 7(6), 767–781.
- Farida, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Maharsani, T. H. (2022). Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 129–140.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Implementasi Pergub No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.
- Nuraini, R. E., & Prathama, A. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 401–412.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, (2012).
- Sahya, A. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia, 251.
- Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Ayup (Ed.)). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Tahun 2020.
- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Nomor 690/404.702/2022 Tentang Tim Pelaksana Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2022. (n.d.).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*